



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DISTRIK MANDOBO KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN

Cornelia Evelin Cabui ¹, Evelince Merasi ²

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the family planning program in Mandobo District, Boven Digoel Regency. The family planning program is one of the government's efforts to suppress population growth and improve the quality of life of the community through controlling birth rates and increasing public awareness of the importance of family planning. The implementation of the Family Planning Program in Mandobo District faces various socio-cultural challenges.

The future Family Planning Program is very holistic and integrative, combining reproductive health services, family education, economic empowerment and protection for vulnerable groups such as adolescents, people with disabilities and communities in remote areas. The family planning approach is more participatory and community-based where the community is not only the target but also the main actor in planning, implementing and evaluating family planning activities. The role of men is a form of gender equality in family decision making. This paper will discuss how the Implementation of the Family Planning Program, as a program that aims to help families regulate child birth, pregnancy spacing and the number of children desired in order to achieve a healthy, prosperous and quality family life. The family planning program is not only related to the use of contraceptives but also includes aspects of education, counseling and reproductive health services run by the BKKBN (National Population and Family Planning Agency).

Keywords: Policy, Program, family planning

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program keluarga berencana di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Implementasi Program Keluarga Berencana di Distrik Mandobo menghadapi berbagai tantangan sosila-budaya.

Program Keluarga Berencana di masa depan sangat bersifat holistic dan integratif menggabungkan layanan Kesehatan reproduksi, Pendidikan keluarga, pemberdayaan ekonomi serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti remaja, penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil. Pendekatan keluarga Berencana lebih bersifat partisipatif dan berbasis komunitas dimana masyarakat tidak hanya menjadi sasaran tetapi juga actor utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan keluarga berencana. Peran laki-laki adalah bentuk kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan keluarga. Tulisan ini akan membahas bagaimana Implemntasi

Kata Kunci: Kebijakan, Program, keluarga berencana

Program Keluarga Berencana, sebagai suatu program yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam mengatur kelahiran anak, jarak kehamilan serta jumlah anak yang diinginkan demi mencapai kehidupan keluarga yang sehat sejahtera dan berkualitas. Program keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi tetapi juga mencakup aspek Pendidikan konseling dan pelayanan Kesehatan reproduksi yang dijalankan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

1. Pengantar

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana masih banyak terjadi masalah yang cukup kompleks terkait kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia masih menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Perkiraan pemerintah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261.355,5 jiwa, dan terus bertambah pada tahun 2021 hingga mencapai 272.682,5 jiwa. (bps.go.id) dengan jumlah sedemikian banyaknya tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan penduduk.

Permasalahan kependudukan di Indonesia perlu perhatian yang cukup serius dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi salah satu kendala dalam pembangunan di beberapa sektor. Jika tidak ditangani, maka berakibat meningkatnya kemiskinan serta kesehatan masyarakat juga akan menurun, sehingga daya saing dari bangsa semakin rendah. Dari permasalahan penduduk tersebut maka perlu adanya suatu kebijakan program pengendalian penduduk. (*World Health Organization*)

Menurut Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan tentang bagaimana mengatur atau mengendalikan tatanan kependudukan terkait dengan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk agar menjadi suatu tatanan penduduk yang merata dan berbanding dengan perekonomian masyarakat tersebut. hal ini juga bertujuan menjadikan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan tanpa adanya kesenjangan ekonomi.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, peneliti mengarah pada Implementasi program keluarga berencana di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. Saat ini Kondisi Masyarakat Distrik Mandobo masih kurang pengetahuan tentang program keluarga berencana dan banyak dari mereka yang belum percaya terhadap program pemerintah tersebut. Selain itu juga partisipasi masyarakat yang kurang dalam keikutsertaan pembangunan program ini serta tingkat Pendidikan yang masih rendah menyebabkan

kebijakan tersebut tidak berjalan dan terhambat sehingga mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang keluarga berencana menjadi kurang efisien dan efektif, hal ini sebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta petugas untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.

1.1. Tabel dan Gambar

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa program Keluarga Berencana ini tidak efektif hal ini terlihat dari pelaksanaannya di beberapa kampung yang ada di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel :

Table 1. Daftar Peserta KB, setiap tahun / Kampung di Distrik Mandobo

No	Kelurahan/ Kampung	Tahun				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persatuan	502 kk	500 kk	409 kk	403 kk	389 kk
2	Sokanggo	201 kk	198 kk	180 kk	175 kk	170 kk
3	Mawan	200 kk	198 kk	192 kk	191 kk	190 kk
4	Ampera	210 kk	201 kk	167 kk	123 kk	120 kk
5	Mariam	199 kk	185 kk	134 kk	132 kk	120 kk

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan table diatas menunjukkan perbandingan peningkatan dan penurunan jumlah partisipasi masyarakat dari 5 kampung di Distrik Mandobo dalam program Keluarga Berencana pada tahun 2019-2021. Dimana pada tiga tahun terakhir ini jumlah penduduk dan \jumlah pasangan usia subur per-kampung di Distrik Mandobo terus mengalami penurunan, namun jika dibandingkan setiap kampung berbeda setiap tahun peserta program keluarga berencana mengalami peningkatan paling signifikan.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjelaskan dalam hasil wawancara terkait dengan Tingginya jumlah penduduk yang dialami oleh Distrik Mandobo ini, yang mana dilatar belakangi oleh kurangnya tingkat partisipasi keluarga dalam mengikuti Program

Keluarga Berencana yang masih kurang, kemudian tingkat pendidikan masyarakat juga di Distrik Mandobo masih sangat rendah sehingga mempengaruhi jalannya Program KB di Distrik Mandobo. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel juga mencatat masih adanya sejumlah penduduk di beberapa Kampung sekitar seluruh penduduknya masih menolak terhadap Program Keluarga Berencana. Masyarakat beranggapan bahwa ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi sebagai sesuatu yang dianggap mencoba memutuskan generasi masyarakat setempat, namun Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjelaskan terkait kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia/ (Staff) yang mana hanya terdiri dari beberapa orang anggota Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Distrik Mandobo serta masih kurangnya peningkatan sarana dan prasarana kerja petugas yang di gunakan pada saat penyuluhan di lapangan. Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Berencana Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.

2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo 2015) menjelaskan bahwa: “Implementasi Kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula bentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak anak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksinya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Adioetomo

2010). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dari peneliti sebagai sumber datanya. Wawancara dan observasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari informan , buku-buku, jurnal dengan tema terkait, situs resmi pemerintah Republik Indonesia, dan media massa terpercaya. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan sebuah penjelasan deskriptif berlandaskan Program Keluarga Berencana.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, tujuan dibentuknya Program Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Distrik atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel berpatokan pada standar nasional yang sesuai dengan regulasi atau keputusan BKKBN. Dalam proses implementasi program Keluarga Berencana yang selaras dengan visi dan misi pembangunan lembaga yang handal dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Serta Keluarga Berkualitas menuju Boven Digoel yang bersatu, sejahtera dan mampu berdaya saing. Salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana adalah menekan lajunya angka kelahiran bayi. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel berhasil menekan angka kelahiran dengan

adanya program Keluarga Berencana , namun program tersebut belum maksimal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat yang masih usia produktif belum memahami pentingnya program Keluarga Berencana. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan konseling setiap tahun yang di dalamnya ada kegiatan pembagian dan pemasangan alat kontrasepsi KB secara gratis bagi masyarakat yang mau menggunakan alat kontrasepsi, di distrik mandobo tepatnya di kampung Mawan, telah dibuat kampung KB, yang mana kampung ini letaknya sangat strategis dalam mempermudah masyarakat yang berdomisili di kampung kampung lain yang jaraknya agak jauh, untuk melakukan konsultasi tentang KB yang setiap tahun di laksanakan kegiatan KB di kampung tersebut.

Secara Sumber daya petugas dari segi kualitas sudah memenuhi syarat yang baik atau sudah sangat memadai, namun dari segi kuantitas masih sangat kurang sehingga mempengaruhi implementasi program KB. adapun alokasi sumber dana dibebankan pada APBD Kabupaten Boven Digoel, namun dana yang dikucurkan tiap tahun tidak sesuai dengan kebutuhan dan minim sehingga mempengaruhi jalannya implementasi program KB. Dalam mendukung jalannya program KB beberapa sarana yang digunakan antara lain terdapat 1 gedung kantor Dinas, 1 gedung balai kampung KB, 1 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, khususnya di distrik mandobo yg letaknya di dalam kota, jangkauannya sangat mudah sehingga dgn sarana yg ada, sangat memudahkan petugas dalam menjalankan program KB”.

Program ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai Pihak-pihak yang terlibat antara lain; Puskesmas sendiri dan tokoh tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran implementasi program KB. Hal ini perlu komunikasi yang baik sebab kalau tidak dilandasi dengan komunikasi yang baik maka program tersebut akan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Komunikasi dan kordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas-puskesmas sebagai mitra yang bergerak dilapangan bersama dalam menjalankan program KB tersebut, sementara untuk elemen lain seperti lembaga masyarakat adat dilibatkan untuk membantu

dalam hal sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program KB karena lembaga adat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengedukasikan program KB tersebut. Ada masyarakat yang menerima secara baik program KB, namun terdapat masalah juga terkait pelaksanaan program KB, hal ini terlihat ketika banyak kepala keluarga yang tidak mengizinkan istrinya untuk mengikuti program KB, sehingga banyak para istri yang mengikuti program KB secara diam-diam. Terdapat penolakan penolakan, dalam bentuk tidak berpartisipasi dalam program KB dengan alasan bahwa program KB ini tidak sejalan dengan pandangan masyarakat bahwa program KB membatasi jumlah anak di setiap keluarga sehingga program ini tidak harus diikuti oleh orang asli Papua. Ketika terjadi penolakan oleh masyarakat maka yang dilakukan oleh petugas adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan misalnya, mendatangi warga di waktu santai dan tanpa atribut kedinasan/ berpakaian dinas, dengan cara seperti ini, masyarakat merasa bahwa tidak ada paksaan dari pemerintah. Seharusnya program ini dilakukan untuk mengatur jarak kelahiran anak, bukan membatasi jumlah kelahiran karena banyak masyarakat yang menolak untuk dibatasi dalam jumlah anak yang diinginkan, maka kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda tahunan dilaksanakan dari DPPKB.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana mengalami kendala yang cukup signifikan dalam perubahan pola pikir terhadap program pemerintahan kepada masyarakat yang dimana perlu adanya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dalam menjelaskan betapa pentingnya program keluarga berencana sehingga masyarakat yang awalnya kurang berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan menjadi lebih aktif dan bisa mempraktekan program keluarga berencana sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan standar nasional BKKBN demi kesejahteraan masyarakat Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.

6. Referensi

- Anastasia Oktaviani. 2011. Implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus: Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana). (Skripsi)
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In Alfa Beta.
- Adioetomo, dkk, 2010, Dasar – dasar Demografi, Salemba Empat, Jakarta
- Affandi,Biran, 2011, Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi,Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara.
- Heny Purwandiyah. 2013. Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur) (Skripsi).
- I Gede Dodie Permana Putra. 2020. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Jurnal Widya Publika. Vol.8, No.1 Juni 2020.
- Priscilla Bawing , Retna Siwi Padmawati , Siswanto Agus Wilopo. 2017. Analisis pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana: studi kasus di Malinau, (Skripsi)
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>